

SKRIPSI

**PENGAWASAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN
SUMATERA BARAT TERHADAP TINDAKAN MALADMINISTRASI
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI KOTA PADANG**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

HABIB SOLIHIN

1610111020

Program Kekhususan : Hukum Administrasi Negara (PK VII)



Pembimbing :

Dr. Hengki Andora, S.H., LLM

Darnis, S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2020**

**PENGAWASAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN
SUMATERA BARAT TERHADAP TINDAKAN MALADMINISTRASI
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU DI KOTA PADANG**

(Habib Solihin, 1610111020, Fakultas Hukum, 2020, 90 halaman)

ABSTRAK

Penerimaan Peserta Didik Baru merupakan salah satu mekanisme dari penyelenggaraan sistem pendidikan yang dilakukan menjelang tahun ajaran baru. Melalui Peraturan Mendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru diatur mengenai tata cara pelaksanaan penerimaan peserta didik baru. Penyelenggaraan Pendidikan setiap satuan pendidikan memiliki kewenangan yang berbeda, Dalam rangka kepastian terjaganya efektivitas dan efisien manajemen pendidikan tersebut, dibutuhkan pengawasan dari lembaga pengawas pendidikan. Pengawasan secara internal dilakukan oleh Dinas Pendidikan sesuai kewenagannya pada Satuan Pendidikan, sedangkan pengawas pendidikan secara eksternal dilakukan Ombudsman Republik Indonesia sesuai dengan laporan dan pengaduan masyarakat terhadap Pelanggaran Penyelenggaraan Pendidikan. Di Kota Padang penyelenggaraan Pendidikan diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Padang, tetapi dalam Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan tersebut masih adanya terjadi permasalahan. Hal ini dapat dilihat dari laporan masyarakat yang diterima oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat dan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru yang masih banyak permasalahan dilapangan. Salah satu materi laporan yang diterima Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat adalah Tindakan Maladministrasi saat Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Padang. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana Tata cara pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Padang?, 2) Bagaimana Tindakan yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat terhadap Maladministrasi Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Padang?, 3) Bagaimana Upaya Pencegahan terhadap Tindakan Maladministrasi Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Padang?. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis (empiris). Penelitian ini bersifat diskriptif analitis, jenis dan sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melalui wawancara dan studi dokumen. Data yang terkumpul dalam penelitian ini baik berupa data kepustakaan maupun data lapangan dianalisis dengan menggunakan analisis secara kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masih terjadinya Tindakan Maladministrasi Penerimaan Peserta Didik Baru di Kota Padang yaitu berupa penyimpangan prosedur, permintaan imbalan, punggutan liar dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan sekolah dan penyelenggara pendidikan.

Kata Kunci : Penerimaan peserta didik baru, Maladministrasi, Pengawasan.